

**PENJELASAN MENGENAI
ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/98**

**Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Disampaikan kepada FKP-FABRI, dan Pers
Jakarta, 5 Januari 1997**

Seperti tertera pada tabel 1, dana yang direncanakan untuk anggaran pembangunan tahun 1997/98 berjumlah Rp38.927,9 miliar atau meningkat 12,8% dibandingkan dengan anggaran pembangunan tahun 1996/97. Anggaran pembangunan untuk RAPBN 1997/98 tersebut sesuai dengan yang direncanakan dalam tahun keempat Repelita VI, hanya sedikit di bawahnya, yaitu 0,4%, seperti terlihat pada tabel 2.

Pada tabel 2, terlihat pula bahwa anggaran pembangunan dalam RAPBN sejak tahun pertama Repelita VI sampai tahun keempat nanti senantiasa konsisten dengan sasaran investasi pemerintah dalam Repelita VI, kalau ada perbedaan pun hanya sedikit di bawah atau di atas sasaran Repelita VI. Dengan investasi Pemerintah yang konsisten dengan rencana tersebut telah dapat dihasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Berarti pula investasi swasta telah berperan lebih besar, dan secara keseluruhan efisiensi ekonomi, seperti antara lain tercermin dalam ICOR, yaitu koefisien yang menghubungkan tingkat pertumbuhan dengan tingkat investasi, ternyata lebih baik dari yang diperkirakan pada waktu Repelita VI dirumuskan.

Pada tabel 3, diperlihatkan bahwa anggaran pembangunan sebesar tersebut, diperoleh dari Tabungan Pemerintah sebesar Rp25.901,9 miliar dan Bantuan Luar Negeri sebesar Rp13.026,0 miliar. Tabungan Pemerintah direncanakan meningkat sebesar 17,3% atau Rp3.812,8 miliar, dibanding dengan tahun 1996/97, sedangkan Bantuan Luar Negeri meningkat hanya 4,9% atau Rp612,4 miliar. Seperti dapat dilihat pada tabel 3, selama Repelita VI ini kemampuan pembiayaan dalam negeri terus meningkat, dari 61,8% pada tahun 1995/96, menjadi 64%, dan kita harapkan meningkat lagi menjadi 66,5%, atau dua pertiga dari seluruh anggaran pembangunan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemandirian dalam pembangunan seperti diamanatkan oleh GBHN.

Dalam menyusun anggaran pembangunan menurut dana yang tersedia tersebut, petunjuk-petunjuk GBHN senantiasa menjadi pegangan, yang paling pokok di antaranya adalah:

Pertama, bahwa prioritas pembangunan diletakkan di bidang ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam rangka membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri serta sejahtera, dalam kehidupan yang serba berkeeseimbangan.

Kedua, bahwa kebijaksanaan pembangunan harus senantiasa bertumpu pada Trilogi Pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan tugas pemerintah terutama adalah mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat.

Dengan berpegang pada petunjuk-petunjuk pokok GBHN 1993 tersebut, telah disusun anggaran pembangunan untuk tahun 1997/98.

Pada tabel 4, diperlihatkan betapa bagian yang cukup besar dari anggaran pembangunan, penggunaannya telah “didaerahkan”, yang terdiri dari dana-dana Inpres dan PBB, yaitu berjumlah

Rp9.910,1 miliar, atau mencapai 38,3% dari seluruh anggaran pembangunan. Dana Inpres sebesar Rp7.630,5 miliar meningkat cukup tinggi, 19,4%, jauh di atas peningkatan anggaran pembangunan yang 12,8% dan peningkatan dana rupiah murni yang 17,3%. Dana PBB yang seluruhnya, kecuali biaya pemungutan, dikembalikan ke daerah meningkat 10% menjadi Rp2.279,6 miliar. Peningkatan 10% itu cukup besar, mengingat bahwa wajib pembayar PBB selama ini telah banyak terjangkau.

Dalam rangka program Inpres, ada tambahan Inpres baru, yaitu **Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS)**, yang sebelumnya kegiatannya berada dalam Inpres Kesehatan. Karena cakupannya makin luas, dan dananya bertambah besar, maka mulai tahun anggaran yang akan datang, kegiatannya akan ditampung dalam Inpres tersendiri.

Pada tabel 5 diperlihatkan betapa dana Inpres dan PBB ini merupakan komponen anggaran pembangunan yang penting bagi APBD, meskipun kecenderungannya kian menurun. Artinya banyak propinsi yang meningkat kemampuan PAD-nya, meskipun bagi sepertiga atau 9 dari seluruh propinsi yang ada, dana-dana Inpres dan PBB itu masih merupakan lebih dari separuh terhadap APBD-nya. Hanya 3 propinsi saja yang peran itu di bawah 10%, atau sekitar 5%, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Peningkatan dana Inpres yang cukup besar itu, yaitu Rp1.241,8 miliar dibandingkan dengan tahun yang lalu, selain karena adanya kegiatan-kegiatan baru dan Inpres baru (PMT-AS) tadi, serta perluasan cakupan dan nilai bantuan berbagai kegiatan yang telah ada dan akan berlanjut, juga karena banyak yang merupakan pengalihan dari kegiatan yang selama ini ditangani oleh instansi pusat yang bertanggung jawab atas sektor yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk makin mendesentralisasikan upaya pembangunan serta mencerminkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari pemerintah daerah yang makin meningkat.

Untuk Inpres Desa, seperti dapat dilihat pada tabel 6 disediakan anggaran Rp468,8 miliar. Ada peningkatan 2,1%, karena dua hal, yaitu pertama, bertambahnya desa, dan kedua, untuk biaya pembinaan masyarakat tertinggal di semua desa di seluruh Indonesia. Semula bantuan pembinaan tersebut hanya diberikan untuk desa-desa IDT saja, dan termasuk dalam anggaran Inpres Desa Tertinggal, namun sekarang upaya penanggulangan kemiskinan telah diperluas mencakup pula seluruh masyarakat miskin di semua desa. Hanya programnya berbeda. Di luar desa-desa IDT, penanggulangan kemiskinan akan dilakukan melalui program Takesra/ Kukesra, memanfaatkan dana yang disisihkan dari masyarakat mampu di samping dana yang akan disediakan oleh pemerintah. Biaya pembinaan ini diberikan pula pada semua tingkatan pemerintah daerah: untuk kecamatan dan Dati II ditampung dalam Inpres Dati II, dan untuk Dati I dalam Inpres Dati I.

Pada tabel 7 diperlihatkan Inpres Desa Tertinggal atau IDT. Dana yang disediakan untuk IDT ditetapkan tidak berubah, hanya pembulatan saja yaitu Rp480,0 miliar. Sesungguhnya seluruh desa IDT yang asli telah memperoleh dana IDT tiga kali, namun karena sejak tahun anggaran yang lalu seluruh desa di 4 propinsi yaitu NTT, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya, dan 4 kabupaten yang terpencil, yaitu Sangihe Talaud, Lubuk Banggai, Riau Kepulauan, dan Nias, memperoleh pula bantuan IDT, maka yang tersisa adalah desa-desa di wilayah tersebut. Jumlahnya adalah 6.573 desa, dan biaya untuk itu disediakan Rp131,5 miliar. Selebihnya digunakan untuk mempercepat pembangunan prasarana dan sarana perdesaan, yang keberadaan atau kelangkaannya mengakibatkan desa-desa itu menjadi tertinggal. Pembangunan prasarana perdesaan ini juga memperoleh bantuan luar negeri, yaitu dari Bank Dunia dan Pemerintah Jepang (OEFCF), namun untuk mempercepatnya, ditambah dana rupiah melalui Inpres ini. Sehingga diharapkan pada akhir Repelita VII seluruh desa di Indonesia telah lebih seimbang ketersediaan prasarannya, dan dapat mengurangi kendala yang menjadi penyebab kemiskinan, sesuai dengan sasaran dalam PJP II untuk menyelesaikan masalah kemiskinan absolut pada akhir Repelita VII. Pada prinsipnya pembangunan prasarana perdesaan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat desa sendiri dengan bimbingan dari instansi teknis yang bersangkutan.

Pada tabel 8, diperlihatkan Inpres Dati II. Inpres ini memperoleh anggaran sebesar Rp3.484,0 miliar, dengan kenaikan terbesar, yaitu 19,9% atau lebih dari setengah triliun. Dan memang dengan kontribusi sebesar 45,6% dari seluruh anggaran untuk Inpres, maka Inpres Dati II adalah yang terbesar, dan sesuai dengan rencana untuk menjadikan Dati II sebagai titik berat otonomi daerah.

Kriteria dasar Inpres Dati II tidak berubah, tetapi ada peningkatan pada jumlah penduduk. Untuk pertama kali, jumlah penduduk Indonesia akan melampaui garis 200 juta (201,4 juta).

Peningkatan yang direncanakan pada Inpres Dati II ini selain karena kenaikan jumlah penduduk itu, dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok.

Pertama, karena diperbesarnya bantuan. Dalam rangka ini bantuan pembangunan pasar kecamatan, naik dari Rp7 miliar menjadi Rp8 miliar.

Selanjutnya, bantuan untuk rehabilitasi SD dan MI, naik Rp85 miliar atau 28,4% menjadi Rp385,1 miliar. Dana itu akan digunakan untuk memperbaiki SD/MI yang rusak berat sebanyak 36 ribu ruang kelas. Diperkirakan ada 127 ribu sekolah yang rusak berat dari 170.871 SD/MI. Karena jumlahnya besar tentu hanya bisa diselesaikan secara bertahap. Dalam program itu juga tercakup pembangunan sarana air bersih di lebih dari 42.000 SD/MI. Dari pemantauan di lapangan ternyata banyak SD/MI yang tidak memiliki sarana air bersih, misalnya untuk mencuci tangan. Kegiatan ini terkait dengan upaya perbaikan derajat kesehatan dan gizi dalam program makanan tambahan untuk anak sekolah.

Bantuan prasarana jalan juga meningkat yang akan mencakup 12.505 km jalan lokal di Dati II. Dana itu, 50% akan digunakan di kawasan timur Indonesia. Upaya ini didukung dengan pembangunan jalan penghubung atau poros desa. Juga ada kenaikan pada bantuan untuk tenaga penyuluh pertanian lapangan, yang mencakup pula bantuan untuk balai informasi dan penyuluh pertanian yang jumlahnya 243 buah.

Kedua, pengalihan dari anggaran sektoral. Pertama, adalah bantuan prasarana dasar pemukiman, yaitu untuk pembangunan perkotaan khususnya dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan perkotaan (*urban poverty*). Semula kegiatan ini ditangani melalui DIP Departemen PU, tetapi sekarang langsung ditangani di daerah, dan untuk itu dananya disediakan Rp290 miliar, naik 20,6% daripada waktu ditangani di tingkat pusat. Dana ini tidak dibagi rata, namun dialokasikan berdasarkan prioritas, urgensi dan kesiapan perencanaan masing-masing kota. Juga dialihkan bantuan bibit yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok petani penghasil bibit yang semula masuk DIP Dep. Pertanian. Besar anggaran yang disediakan adalah Rp25 miliar.

Ketiga, program baru, yaitu bantuan kepada Dati II untuk mengendalikan dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Dana ini merupakan pemancing bagi upaya Pemda Dati II dan masyarakat Dati II sendiri untuk melestarikan fungsi lingkungan di wilayahnya.

Mengenai Inpres Dati I dapat dilihat pada tabel 9. Dana untuk Inpres ini tersedia Rp1.661,9 miliar, naik 16,7%.

Kriteria bantuan dasar tidak banyak berubah, dan seperti halnya pada Inpres Dati II, kenaikan diakibatkan karena perluasan cakupan, pengalihan dari DIP di instansi pusat, dan kegiatan baru dalam Inpres.

Yang *pertama*, yakni perluasan cakupan, terutama adalah untuk bantuan peningkatan jalan, yang naik 21,6%, antara lain untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di beberapa kota besar, yang untuk itu disediakan Rp30 miliar. Juga meningkat cukup besar bantuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan, yang naik 45%. Hal ini dikarenakan meningkatnya areal irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemda dengan lebih dari 1 juta ha, di antaranya 247 ribu ha areal pengairan baru.

Kedua, beberapa kegiatan merupakan pengalihan dari kegiatan sektoral yang sekarang telah siap untuk "didaerahkan", yaitu bantuan pengembangan wilayah dan Prasarana Fisik

Pamong Praja, yaitu bantuan prasarana fisik seperti untuk kantor-kantor Kecamatan, yang selama ini ditangani Departemen Dalam Negeri, selanjutnya akan langsung ditangani oleh Pemda Dati I.

Ketiga, kegiatan-kegiatan baru. Salah satu sumber pendapatan bagi daerah yang penting adalah PBB. Namun, ada sebagian wilayah di daerah yang tidak bisa dibudidayakan, sehingga tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah, yaitu kawasan-kawasan lindung. Maka untuk daerah-daerah yang memiliki kawasan lindung, akan diberikan bantuan khusus sekaligus untuk membantu pengelolaan kawasan lindung itu sendiri. Dana yang disediakan untuk itu adalah Rp34,4 miliar, dan pembagiannya mengikuti pembagian PBB, untuk Dati II dan Dati I. Namun, pada tahap ini penganggarannya digabungkan terlebih dulu melalui Inpres Dati I. Selanjutnya, yang baru pula adalah bantuan pembinaan kebudayaan, yaitu bantuan untuk pengembangan kebudayaan daerah, agar di tengah-tengah arus globalisasi budaya, dapat tetap tumbuh subur sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional seperti diamanatkan oleh konstitusi. Dana ini harus di-"match" dengan sumber daya dari daerah sendiri, baik dari Pemerintah Daerah maupun yang bersumber dari masyarakat di daerah. Demikian pula disediakan dana untuk membantu daerah dalam membina dan mengadakan pembibitan olahraga prestasi, mengingat pentingnya pembinaan olahraga selain untuk membangun bangsa yang kuat, juga untuk membawa nama baik dan martabat bangsa di dunia. Pembibitan olahraga harus dilakukan di seluruh daerah secara serempak. Bantuan kepada Daerah diberikan pula untuk membina kerukunan hidup umat beragama, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di seluruh wilayah tanah air. Biaya ini terutama adalah untuk membantu penyelenggaraan musyawarah-musyawarah antaragama di daerah, di luar kegiatan-kegiatan pembangunan bidang agama itu sendiri. Seperti untuk Dati II, untuk Dati I juga disediakan dana untuk pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengendalian dampak lingkungan karena kegiatan pembangunan.

Tidak semua kegiatan anggarannya meningkat. Ada juga yang turun seperti bantuan penataran P-4. Anggaran untuk kegiatan penataran di sini telah berkurang karena telah selesainya program penataran bagi penatar yang pembiayaannya dibantu oleh pemerintah pusat. Bantuan selanjutnya adalah untuk menyediakan buku materi penataran, sedangkan penyelenggaraan penataran itu sendiri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Inpres Sekolah Dasar, ada pada tabel 10. Dana untuk Inpres ini disediakan Rp663,2 miliar, meningkat 11,4%. Bantuan untuk biaya operasi dan pemeliharaan, yang diberikan kepada setiap sekolah, akan dinaikkan dari Rp700 ribu menjadi Rp800 ribu, antara lain untuk melengkapi dan memperbaharui perabot sekolah. Karena jumlah SD/MI besar, maka bantuan ini meskipun kelihatannya kecil tetapi secara keseluruhan besar jumlahnya. Juga nilai itu sangat berarti terutama bagi daerah-daerah tertinggal dan terpencil di mana kemampuan orang tua murid untuk membantu pengelolaan sekolah sangatlah terbatas.

Selanjutnya ada kenaikan dalam pembangunan gedung SD, ruang kelas baru, serta kegiatan penataran dan penyeteraan guru setingkat D-2. Anggaran ini akan membiayai penataran bagi 275.625 guru agama dan guru kelas.

Ada satu kegiatan tambahan, yang mungkin tidak perlu dilakukan setiap tahun, yaitu pada tahun 1997/98 akan diadakan pendataan dari seluruh SD/MI di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Ini semacam "sensus", untuk mengetahui secara tepat jumlah SD/MI yang betul-betul ada dan beroperasi, kondisi SDM-nya, terutama para guru dan muridnya, serta kondisi fisik sekolah. Dengan demikian, maka program-program pembangunan pendidikan dasar selanjutnya tersusun dengan sesungguhnya berdasarkan kenyataan di lapangan, sehingga dana yang ada dan jumlahnya terbatas itu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Inpres Kesehatan ada pada Tabel 11. Dana untuk Inpres ini tersedia Rp607,8 miliar, meningkat 15,6%. Sesungguhnya peningkatannya akan jauh lebih tinggi kalau saja salah satu programnya yang sekarang termasuk dalam Inpres ini, yaitu Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS), tidak dikeluarkan menjadi Inpres tersendiri.

Peningkatan yang besar seperti pada kelompok Inpres lainnya, adalah selain karena perluasan cakupannya, juga karena adanya pemindahan dari kegiatan sektoral di tingkat pusat,

menjadi kegiatan Inpres. Ini yang menyebabkan kenaikan pada bantuan obat, hampir 60% yaitu menjadi lebih dari Rp280,9 miliar.

Bantuan obat dinaikkan untuk mengatasi penyakit yang meluas di masyarakat, yaitu TB Paru, malaria, kekurangan vitamin A, diare, dan lain-lain. Selain itu juga program kapsul yodium dan vaksin BCG serta hepatitis B. Untuk pencegahan hepatitis B saja disediakan vaksin untuk 4,6 juta bayi, praktis dapat menjangkau seluruh bayi yang dilahirkan tahun yang akan datang. Dana untuk pengadaan berbagai vaksin tersebut meningkat 66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika masih berada pada DIP Dep. Kesehatan.

Pembangunan fisik masih dilanjutkan sesuai program dalam Repelita VI. Pembangunan puskesmas pembantu terus dilakukan terutama diarahkan ke daerah transmigrasi dan permukiman baru serta masyarakat terasing. Anggaran untuk itu meningkat lebih dari 41%. Selain itu puskesmas yang telah ada ditingkatkan juga kemampuan dan mutu pelayanannya dan anggaran untuk itu meningkat hampir 25%.

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kesehatan, anggaran untuk pelatihan, penempatan dan biaya operasional ditingkatkan. Meskipun ada juga yang menurun sesuai dengan programnya. Jumlah bidan baru telah berkurang, karena boleh dikatakan di seluruh desa telah ditempatkan bidan desa. Terlihat pula peningkatan pada kegiatan penyehatan lingkungan permukiman dan penyediaan air bersih sebesar 26,2%. Kenaikan anggaran ini, terutama untuk penyediaan air bersih di perdesaan yang naik hampir 40%.

Inpres yang terakhir adalah program makanan tambahan untuk anak sekolah atau Inpres PMT-AS, yaitu pada tabel 12.

Program makanan tambahan untuk anak sekolah ini telah dimulai sejak tahun 1995/96 dalam skala kecil sebagai pilot project, dan dilanjutkan tahun 1996/97 sebagai salah satu kegiatan dari Inpres Kesehatan. Pada tahun 1996/97 sasaran program ini meliputi 18.318 SD/MI yang berlokasi di 14.445 desa IDT, dan mencakup lebih dari 2,3 juta murid.

Dari pemantauan yang dilakukan, program makanan tambahan anak sekolah ini sangat berhasil, bukan saja terhadap anak sekolah yang bersangkutan dalam meningkatkan gairah belajar, tetapi juga telah meningkatkan kehidupan perekonomian di desa tertinggal tempat program tersebut dilaksanakan karena membantu memasarkan produksi setempat, yang meningkat antara lain berkat program IDT.

Atas dasar itu, maka program ini telah dapat ditingkatkan cakupannya dan karena itu pula koordinasinya melalui Inpres tersendiri. Dalam Inpres ini seluruh desa yang memperoleh bantuan dana IDT, yaitu 28.326 desa akan dicakup.

Jumlah murid yang akan memperolehnya meningkat menjadi lebih dari 7,4 juta yang bersekolah di 49.138 SD/MI negeri maupun swasta. Program ini akan mencakup 24,9% dari seluruh murid di 28,8% SD/MI di seluruh Indonesia. Di samping makanan tambahan tiga kali seminggu juga diberikan obat cacing untuk semua murid, sekali setahun. Bersamaan dengan program ini diupayakan pula penyediaan sarana air bersih untuk SD/MI, yang dilaksanakan melalui program lain (Inpres Dati II). Dengan demikian dari segala jurusan diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan, serta derajat gizi anak-anak sekolah sejak tingkat yang paling mendasar untuk membangun kader pembangunan masa depan yang cerdas dan sehat. Seperti yang telah berlaku selama ini, program ini merupakan kegiatan bersama antara Ibu-ibu PKK, orang tua murid, sekolah, dengan bimbingan dan pengawasan aparat desa. Juga ditegaskan bahwa bahan pangannya haruslah produk pertanian yang berasal dari desa setempat atau kawasan sekitarnya.

Kita harapkan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, secara bertahap program ini dapat menjangkau semua murid SD/MI di seluruh Indonesia, yang dewasa ini berjumlah 29,7 juta. Di daerah-daerah yang telah maju, seperti di kawasan perkotaan dan desa-desa yang masyarakatnya telah baik keadaan ekonominya keikutsertaan masyarakat terutama sebagai orang tua murid, patut pula dikembangkan.

Selanjutnya akan diberikan penjelasan anggaran menurut sektor, yang pelaksanaannya dilakukan baik oleh instansi pusat maupun oleh daerah.

Anggaran pembangunan secara keseluruhan meningkat 12,8%, dan anggaran rupiahnya meningkat 17,3%, namun tingkat kenaikan itu tidak diterapkan secara merata untuk semua sektor, oleh karena anggaran pembangunan harus merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam Repelita VI serta berbagai prioritasnya. Demikian pula ada faktor bantuan luar negeri yang tidak diperlukan dan tidak cocok untuk semua sektor. Dengan selesainya atau berkurangnya kegiatan diberbagai sektor yang dibiayai bantuan luar negeri itu ada beberapa subsektor yang menurun dana pembangunannya. Hal itu tidak mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan di bidang tersebut berkurang prioritasnya.

Demikian pula ada kenaikan-kenaikan yang lebih besar di sektor-sektor tertentu dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, karena memang diperlukan perhatian yang lebih besar pada berbagai kegiatan di bidang-bidang tersebut, dengan tidak mengabaikan kepentingan sektor lainnya.

Sektor yang kenaikannya tertinggi adalah kependudukan dan keluarga sejahtera (Sektor 12), yaitu 110,6%. Kenaikan ini adalah dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan keluarga sejahtera yang akan diterapkan di desa-desa di luar IDT. Dana dari pemerintah untuk itu disediakan Rp300 miliar, yang akan diperkuat dengan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam rangka program Takesra dan Kukesra. Dana tersebut bersifat bergulir (*revolving*).

Kenaikan terbesar kedua ada pada sektor 19, yaitu sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media masa. Terutama adalah untuk mendukung kegiatan dalam menyukseskan pemilihan umum dan sidang umum MPR yang akan berlangsung pada tahun anggaran yang akan datang. Kenaikannya adalah 56,2%.

Kenaikan terbesar ketiga adalah pada sektor 13, yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan sosial yang naik dengan 53,6%. Bukan hanya dalam persentase, dalam nilai absolut pun sektor ini memperoleh kenaikan terbesar di antara semua sektor yaitu Rp732,3 miliar. Tetapi kenaikan yang paling besar adalah pada subsektor peranan wanita, anak dan remaja, yaitu dengan 237,4%.

Kenaikan terbesar keempat ada pada sektor tenaga kerja (44%), terutama untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pelatihan guna mengatasi masalah pengangguran, suatu masalah yang sungguh-sungguh memerlukan perhatian, bukan hanya atas dasar pertimbangan sosial ekonomi tetapi juga karena besar pengaruhnya terhadap stabilitas nasional.

Kenaikan terbesar kelima adalah pada sektor 05, yaitu perdagangan dan pengembangan usaha nasional serta koperasi sebesar 37,0%, sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekspor non migas serta pengembangan usaha kecil dan koperasi.

Kenaikan besar juga direncanakan untuk sektor pendidikan, yang secara absolut memperoleh kenaikan terbesar kedua, sesudah sektor kesehatan dan lain-lain (sektor 13 tadi) yaitu dengan Rp706,3 miliar. Bahwa kenaikan terbesar secara absolut diberikan kepada sektor-sektor kesehatan dan pendidikan, menunjukkan komitmen yang besar pada peningkatan kualitas SDM sebagai titik berat pembangunan pada PJP II seiring dengan bidang ekonomi, sesuai amanat GBHN 1993. Kenaikan untuk kedua sektor ini saja hampir Rp1,5 triliun.

Secara ringkas rencana di berbagai sektor menurut urutannya adalah sebagai berikut.

Anggaran pembangunan sektor Industri sebagai sektor pertama, berjumlah Rp589,7 miliar atau meningkat 16,4%. Di dalamnya termasuk dukungan untuk kegiatan berbagai usaha industri sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui peningkatan kemampuan teknologi, penelitian dan pelatihan-pelatihan. Prioritas diberikan untuk mendukung pertumbuhan wirausaha industri baru, pengembangan industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor serta meningkatkan kemampuan balai-balai litbang industri dan lembaga

litbang teknologi lainnya dalam memberikan jasa pelayanan teknis kepada dunia industri, terutama industri kecil dan menengah.

Sektor Pertanian termasuk Kehutanan memperoleh anggaran sebesar Rp1.513,0 miliar meningkat 16,9%. Pembangunan pertanian diarahkan antara lain pada pemantapan swasembada pangan, peningkatan daya saing berbagai komoditas unggulan pertanian, dan pengentasan penduduk di pedesaan dari kemiskinan. Upaya pembangunan di sektor ini mengikutsertakan kelompok tani dan koperasi dengan pembinaan kemitraan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Sedangkan pembangunan kehutanan ditekankan pada kelestarian fungsi ekologis di samping pengembangan fungsi sosial ekonomis hutan.

Sektor Pengairan akan memperoleh anggaran sebesar Rp2.616,1 miliar atau meningkat sebesar 12,9%. Anggaran di sektor ini direncanakan untuk melanjutkan pembangunan waduk dan embung, prasarana penyediaan air baku di berbagai kota, prasarana pengendalian banjir di perkotaan dan daerah sentra produksi pertanian, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi baru serta peningkatan daerah rawa. 38% atau Rp994,1 miliar dari anggaran di sektor ini akan digunakan untuk kegiatan di kawasan timur Indonesia (KTI).

Salah satu kegiatan yang penting dalam sektor ini adalah melanjutkan pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah dalam menunjang swasembada dan ketahanan pangan nasional, serta melanjutkan rehabilitasi jaringan irigasi desa yang tahun depan direncanakan mencakup 200 ribu hektar, di mana 27%-nya berada di KTI.

Sektor Tenaga Kerja memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp269,4 miliar. Sektor ini merupakan salah satu yang memperoleh persentase kenaikan tertinggi, dan makin menonjol perannya bukan hanya dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, tetapi juga dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja termasuk pekerja wanita dan anak, dan mengatasi masalah-masalah perburuhan, yang makin marak, sehubungan dengan makin banyaknya pekerja di sektor industri dan kawasan perkotaan.

Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional dan Koperasi yang direncanakan akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp549,9 miliar, merupakan salah satu sektor yang memperoleh kenaikan tertinggi. Untuk pengembangan usaha kecil dan koperasi, dana dari APBN hanyalah sebagian saja dari sumber daya yang tersedia untuk sektor ini. Karena selain itu ada berbagai skim kredit, dana kemitraan dari para pengusaha besar, serta dana 1-5% dari keuntungan BUMN. Selain itu, untuk pengadaan pemerintah, pengutamaannya harus makin diarahkan pada hasil produksi barang dan jasa dari usaha kecil dan menengah.

Sektor keenam adalah Transportasi, termasuk di dalamnya Meteorologi dan Geofisika. Untuk sektor ini disediakan anggaran cukup besar yaitu Rp6.849,9 miliar. Anggaran untuk sektor ini merupakan urutan terbesar kedua sesudah sektor Pembangunan Daerah. Lebih dari dua pertiganya (66%) dialokasikan pada subsektor prasarana jalan. 65% di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan prasarana jalan di luar Jawa termasuk 62% -nya di Kawasan Timur Indonesia, untuk membuka daerah-daerah yang terisolir termasuk daerah-daerah perbatasan dan transmigrasi di samping mendukung pembangunan wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat.

Dalam sektor prasarana ini prioritas memang diberikan pada wilayah yang tertinggal seperti propinsi-propinsi di KTI. Misalnya pada subsektor Transportasi Darat, khususnya Program Pengembangan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, 67% anggaran rupiah murninya adalah untuk proyek-proyek yang berada di wilayah KTI.

Untuk memanfaatkan jalan-jalan raya yang telah dibangun akan ditingkatkan angkutan bus perintis untuk wilayah terpencil terutama di KTI dan juga untuk kota-kota besar yang memang sangat membutuhkan angkutan bus, seperti untuk wilayah DKI Jakarta.

Di bidang perkeretaapian diupayakan terus untuk meningkatkan pelayanan, keamanan dan kapasitas lintas kereta api di antaranya melanjutkan pembangunan jalan kereta api baru,

termasuk jalan kereta api di Sumatera bagian Selatan untuk menunjang peningkatan kebutuhan angkutan batu bara.

Dalam subsektor Transportasi Laut direncanakan untuk membangun dan merehabilitasi dermaga di 47 lokasi, di antaranya 32 lokasi (68%) berada di KTI. Juga dilanjutkan pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran, dan pemberian subsidi operasi 39 kapal perintis (34 kapal atau 87% di antaranya beroperasi di kawasan timur Indonesia). Pembangunan dalam subsektor Transportasi Udara, akan mengembangkan bandara di 16 lokasi, 9 lokasi di antaranya berada di KTI, serta melanjutkan pembangunan bandara perintis di 3 lokasi, 2 di antaranya di KTI. Anggaran untuk kedua subsektor ini (transportasi laut dan udara) menurun oleh karena banyak proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri telah selesai atau berkurang kegiatannya. Namun anggaran rupiahnya tetap meningkat.

Dalam sektor ini juga ada kegiatan-kegiatan meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan (SAR) yang penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor, seperti pengamatan cuaca.

Sektor 07 Pertambangan dan Energi memperoleh anggaran terbesar urutan keempat yaitu Rp4.423,0 miliar. Sebagian besar, yaitu 98,6% di antaranya adalah untuk subsektor Energi, terutama menunjang pembangunan kelistrikan. Tanggung jawab pendanaan PLN dan keikutsertaan dunia usaha dalam program kelistrikan telah meningkat terutama di pulau Jawa dan di daerah padat penduduk dan yang ekonominya telah berkembang sehingga dukungan pemerintah pada PLN terutama adalah untuk daerah di luar Jawa, serta sebagian kebutuhan transmisi dan distribusi di Jawa dengan titik berat pada listrik perdesaan. Dalam tahun 1997/98 desa yang dilistriki bertambah dengan 5.271 desa di antaranya 24,9% berada di KTI melalui pembangunan pembangkit dan jaringan baru serta perluasan jaringan listrik yang sudah ada. Dengan demikian telah 42.280 desa memperoleh aliran listrik, atau 65,6% dari seluruh desa di tanah air.

Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi memperoleh anggaran sebesar Rp962,7 miliar. Secara keseluruhan ada penurunan karena berkurangnya anggaran untuk subsektor pos dan telekomunikasi. Berkurangnya anggaran untuk subsektor ini adalah karena telah makin besarnya peran masyarakat dalam pembangunan subsektor ini dan berkurangnya komponen bantuan luar negeri. Tetapi anggaran untuk subsektor pariwisata meningkat cukup besar yaitu 33,9% salah satu peningkatan subsektor yang termasuk terbesar. Tujuannya adalah mendukung pengembangan kepariwisataan sebagai sumber lapangan kerja dan perolehan devisa yang amat penting. Dengan anggaran yang tersedia itu, kapasitas pengembangan jasa pos dan giro terus meningkat, didukung jaringan kantor pos dan kantor pos pembantu, serta jaringan pos keliling kota dan pos keliling desa. Pembangunan jasa telekomunikasi adalah salah satu yang telah jauh melampaui sasaran Repelita VI terutama karena meningkatnya peran swasta. Anggaran pembangunan dari pemerintah masih ada antara lain untuk pembangunan kapasitas telepon baru sebanyak 700.000 satuan sambungan termasuk telekomunikasi perdesaan, serta pembangunan jaringan transmisi telekomunikasi untuk meningkatkan hubungan antara berbagai wilayah di Indonesia khususnya antara kawasan barat dengan kawasan timur.

Sektor yang memperoleh anggaran terbesar adalah sektor 09, yaitu Pembangunan Daerah termasuk Transmigrasi, yaitu Rp7.164,1 miliar. Sebagian dari sektor ini, telah tercakup dalam program-program Inpres. Pembangunan daerah sesungguhnya bukan hanya dengan Inpres-inpres itu saja, karena semua sektor pun kegiatannya berlangsung di daerah, sehingga merupakan bagian pula dari pembangunan daerah.

Dalam sektor ini, subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, memperoleh anggaran Rp1.487,8 miliar, suatu kenaikan yang cukup besar, yaitu 32,7%. 68% dari seluruh kegiatannya berlokasi di kawasan timur Indonesia. Dengan anggaran ini akan diupayakan penempatan 60.000 kepala keluarga transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa berbantuan. Di antaranya 20.000 kepala keluarga akan ditempatkan di lokasi yang telah selesai disiapkan di Kalimantan Tengah, yaitu proyek 1 juta hektar lahan gambut.

Berikutnya, Sektor Lingkungan Hidup termasuk Tata Ruang memperoleh anggaran Rp685,8 miliar, meningkat cukup besar, terutama anggaran rupiahnya. Sedangkan bantuan luar negeri menurun karena telah berkurang kegiatannya. Anggaran rupiah untuk sektor ini meningkat 30,5%, untuk memperkuat kemampuan aparat pemerintah dalam mengamankan lingkungan hidup serta mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Mulai tahun anggaran yang akan datang, Pemerintah Daerah diharapkan berperan lebih besar dalam masalah lingkungan hidup, dan untuk itu Pemerintah Pusat memberi bantuan melalui mekanisme Inpres seperti telah dikemukakan tadi.

Sektor berikutnya, yaitu Pendidikan, termasuk Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga, menempati urutan anggaran terbesar ketiga dengan Rp4.676,9 miliar, dan merupakan 12,0% dari seluruh anggaran pembangunan. Secara absolut sektor ini memperoleh kenaikan anggaran kedua terbesar.

Sebagian kegiatan di sektor ini tercakup dalam berbagai Inpres. Selain itu prioritas di bidang pendidikan adalah untuk melanjutkan wajib belajar 9 tahun sesuai rencana, di samping perluasan dan peningkatan pendidikan kejuruan, serta peningkatan kualitas pendidikan di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Perhatian lebih besar akan diberikan pada peningkatan kualitas tenaga-tenaga pengajar di semua jenjang. Patut dicatat pula peningkatan yang besar pada subsektor pemuda dan olahraga dengan 52,9%, kebudayaan 37% dan pendidikan luar sekolah serta kedinasan 32,3%.

Mengenai sektor 12, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, tadi telah dikemukakan adalah sektor yang paling tinggi kenaikannya. Sektor ini anggarannya meningkat lebih dari dua kali menjadi Rp690,9 miliar. Selain mendukung upaya mensejahterakan keluarga miskin melalui pendekatan keluarga sejahtera, upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana sangat penting artinya dan tetap mendapat prioritas.

Sektor ke 13, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, dengan anggaran Rp2.097,2 miliar memperoleh kenaikan anggaran (absolut) terbesar, sedangkan dalam persentase kenaikannya adalah ketiga terbesar. Perlu dicatat pula adanya peningkatan besar pada subsektor kesejahteraan sosial sebesar 62,5%, sehingga dapat meningkatkan upaya untuk membangun taraf kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, terutama masyarakat terasing, fakir miskin, anak terlantar, dan lanjut usia dari keluarga yang tidak mampu.

Bidang kesehatan sendiri dengan anggaran Rp1.505,0 miliar, memperoleh kenaikan yang cukup besar, yaitu 37,7%. Di antaranya yaitu 30,6% melalui Inpres kesehatan disalurkan langsung ke seluruh pelosok daerah untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang seluas-luasnya. Selebihnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dan pembangunan rumah sakit baru, serta peningkatan kemampuan rumah sakit-rumah sakit Dati II terutama di Dati II yang terpencil seperti di propinsi-propinsi di kawasan timur.

Sektor pembangunan selanjutnya, Perumahan dan Permukiman, memperoleh anggaran sebesar Rp1.533,8 miliar. Dana di sektor ini antara lain disediakan untuk mendukung pembangunan 110.000 rumah sederhana dan sangat sederhana. Juga termasuk di dalamnya upaya memperluas penyediaan pelayanan air bersih untuk 6 juta penduduk, di wilayah perdesaan maupun perkotaan, serta peningkatan lingkungan permukiman terutama di kawasan perkotaan.

Sektor Agama memperoleh anggaran Rp304,0 miliar. Sektor ini senantiasa memperoleh perhatian karena memang besar sekali perannya antara lain dalam rangka program pendidikan dasar 9 tahun dengan Madrasah-madrasah Tsanawiyah-nya. Selain itu, pelayanan kehidupan beragama, terutama dalam rangka terus-menerus membina kerukunan antarumat beragama, merupakan kegiatan yang penting pula dalam sektor agama. Hal itu tercermin dalam peningkatan anggaran untuk subsektor itu, yang termasuk urutan tertinggi, yaitu 43%.

Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memperoleh anggaran Rp881,8 miliar. Programnya meliputi upaya untuk mengembangkan kapasitas sumber daya penelitian termasuk

pengembangan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan jasa teknologi. Bahkan untuk kebutuhan itu anggaran yang disediakan meningkat 89,6%. Kegiatan-kegiatan penelitian ini teramat penting, oleh karena kita akan segera memasuki abad ke-21, yang akan ditandai oleh persaingan yang makin ketat, di mana penguasaan teknologi menjadi faktor yang menentukan dalam daya saing.

Sektor berikutnya, yaitu sektor 19, persentase peningkatannya cukup besar, yaitu kedua terbesar terutama untuk kegiatan penerangan. Sektor ini mencakup bidang politik, hubungan luar negeri, serta penerangan, komunikasi dan media massa, dan memperoleh anggaran Rp286,1 miliar. Anggaran untuk subsektor politik, sebagian besar digunakan untuk kegiatan penataran P-4 di daerah yang penyelenggaraannya dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran untuk hubungan luar negeri meningkat cukup besar, antara lain untuk mendukung peningkatan diplomasi kita di luar negeri, terutama dalam menangkali kampanye negatif terhadap Indonesia.

Di bidang penerangan, selain untuk kesiapan menghadapi banyak kegiatan di bidang politik tahun depan juga diupayakan untuk lebih meningkatkan mutu, cakupan dan pemerataan informasi pembangunan ke seluruh pelosok tanah air. Untuk itu antara lain akan dibangun stasiun-stasiun pemancar televisi kecil di daerah-daerah yang relatif terpencil, yang sebagian besar berada di KTI.

Sektor Hukum, dalam tahun 1997/98 memperoleh anggaran sebesar Rp195,0 miliar. Sejak Hukum ditempatkan sebagai bidang pembangunan tersendiri dalam GBHN 1993, sektor ini memperoleh prioritas besar, yang tercermin dalam pengalokasian anggaran pembangunan yang terus meningkat. Dengan anggaran yang terus meningkat ini diharapkan hukum dapat makin menjalankan fungsi dan perannya sebagai sarana untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan serta sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Diharapkan penyelesaian produk perundang-undangan dapat lebih cepat terutama penyempurnaan produk-produk perundangan kolonial, demikian pula penyelesaian perkara diberbagai tingkat peradilan. Untuk itu pula anggaran rupiah untuk sarana dan prasarana hukum meningkat cukup besar yakni 26,2%. Diharapkan dengan pembangunan hukum yang terus meningkat akan meningkat pula citra dan wibawa hukum dalam masyarakat.

Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan memperoleh anggaran sebesar Rp911,0 miliar. Anggaran sektor ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan aparatur negara kepada masyarakat, kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan, serta dalam mendorong, membimbing dan menunjang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan teramat penting dan cakupannya ditingkatkan, namun sesuai dengan kaidah anggaran yang benar, kegiatan pengawasan yang berlangsung secara rutin telah dialihkan ke anggaran rutin. Jadi apabila tampak ada penurunan bukan oleh karena berkurang anggarannya, tapi beralih saja jenis pengeluarannya.

Sektor yang terakhir adalah sektor Pertahanan dan Keamanan yang mendapatkan anggaran sebesar Rp1.727,6 miliar. Dalam pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan pengadaan peralatan canggih yang banyak di antaranya harus diimpor. Oleh karena itu, porsi dana luar negeri dalam sektor ini cukup besar, yaitu 37,1%. Anggaran rupiah murni sendiri juga meningkat cukup besar, yaitu 20,9%. Dana itu digunakan antara lain untuk melanjutkan rehabilitasi rumah kumuh dan tidak layak huni di pangkalan-pangkalan ABRI dan sebagai dana pendamping bagi pengadaan peralatan impor. Di samping itu juga untuk membiayai pengadaan peralatan yang telah dihasilkan di dalam negeri seperti oleh industri-industri strategis. Prioritas pembangunan pertahanan dan keamanan dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan secara bertahap melengkapi peralatan kesatuan-kesatuan yang masih belum memenuhi standar minimal.

Secara agak lebih rinci rencana pembangunan di beberapa sektor dan subsektor beserta sasaran-sasarannya disajikan pada bagian akhir bahan laporan ini, yaitu pada bab II.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa anggaran pembangunan tahun 1997/98 sebagai tahun keempat Repelita VI, dan tahun terakhir yang disusun dan dilaksanakan oleh Kabinet Pembangunan VI, mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama-tama mewujudkan sasaran-sasaran Repelita VI.
2. Secara khusus titik berat diletakkan pada upaya untuk makin pemeratakan upaya dan hasil pembangunan, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan dan berbagai kesenjangan.
3. Pembangunan sumber daya manusia menempati prioritas yang tinggi, dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas angkatan kerja serta menyiapkan generasi pembangunan yang berkualitas di masa depan.
4. Pembangunan prasarana ekonomi terus dilanjutkan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka wilayah-wilayah yang terisolasi, serta mengembangkan potensi masyarakat terutama di daerah yang terbelakang, dengan tetap menjaga keserasian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Secara keseluruhan investasi pemerintah dimaksudkan untuk mendukung dan memberi arah bagi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dunia usaha, yang perannya akan berkembang makin besar di hari-hari mendatang.

Sebagai penutup, rancangan anggaran pembangunan pada tahap ini disusun sampai sektor dan subsektor. Selanjutnya akan dirinci lebih lanjut ke dalam program dan proyek. Dalam penyusunan proyek-proyek pembangunan tahun 1997/98 diupayakan tidak ada lagi proyek yang tidak mengacu kepada Sarlita, yaitu sasaran tahunan repelita.

Untuk menjamin sinkronisasi antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, proyek-proyek pembangunan telah direncanakan secara berjenjang dengan menggabungkan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Proses ini telah berjalan sejak April sampai dengan Oktober 1996, mulai dari tingkat desa dan kecamatan, Dati II, Dati I, antarpropinsi sepulau/kawasan, sampai ke tingkat nasional yaitu konsultasi nasional pembangunan (Konasbang). Dengan demikian setiap Gubernur telah mengetahui prioritas proyek-proyek sektoral yang akan dilaksanakan dan berlokasi di daerahnya dan siap untuk mendukung dan mengamankannya. Oleh karena itu, dalam tahun 1997/98 diupayakan tidak ada proyek di luar yang telah dibahas dengan para Gubernur tersebut, untuk menjamin keserasian serta keterpaduan pada tingkat pelaksanaannya nanti di daerah.